

**SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA ROKOK TANPA PITA CUKAI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN  
BULELENG**

**Oleh**

**Putu Agus Rio Krisnawan, NIM 2114101058**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Buleleng dan mengkaji hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng. Studi ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Sumber digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang semuanya terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan meliputi studi dokumen, metode pengamatan, dan metodologi wawancara. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel adalah non-probabilitas, dengan teknik pengambilan sampel purposive dan snowball untuk pemilihan subjek. Selain itu, data diperoleh, diproses, dan dinilai secara kualitatif. Temuan menunjukkan sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Buleleng terdapat pada pasal 62 ayat (1) UUPK, KUHPerdara pada pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dan pasal 54 Undang-undang tentang cukai, sanksi yang diberikan belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan masih adanya pelaku usaha yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng serta sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha belum memberikan efek jera dan hambatan-hambatan yang dialami instansi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng yaitu dari dalam instansi terkait dan juga terdapat hambatan yang terjadi dari luar instansi terkait.

**Kata Kunci:** Sanksi, rokok tanpa pita cukai, pelaku usaha.

**SANCTIONS AGAINST CIGARETTE BUSINESS PEOPLE WITHOUT  
EXCISE TAPS ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING  
CONSUMER PROTECTION IN THE DISTRICT  
BULELENG**

*By*

**Putu Agus Rio Krisnawan, NIM 2114101058**

***Legal Studies Program***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the sanctions against cigarette business actors without excise stamps according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in Buleleng Regency and to examine the obstacles faced by the government against the circulation of cigarettes without excise stamps in Buleleng Regency. This study uses empirical legal research, using a descriptive research approach. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, all of which consist of primary and secondary data. Data collection techniques used include document studies, observation methods, and interview methodology. The method used to determine the sample is non-probability, with purposive and snowball sampling techniques for selecting subjects. In addition, data is obtained, processed, and assessed qualitatively. The findings show that sanctions against cigarette business actors without excise stamps according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in Buleleng Regency are contained in Article 62 paragraph (1) of the UUPK, the Civil Code in Article 1365 concerning unlawful acts, and Article 54 of the Law concerning excise, the sanctions given have not been implemented optimally, this is because there are still business actors who sell cigarettes without excise stamps in Buleleng Regency and the sanctions given to business actors have not provided a deterrent effect and the obstacles experienced by agencies against the circulation of cigarettes without excise stamps in Buleleng Regency, namely from within the relevant agencies and there are also obstacles that occur from outside the relevant agencies.*

**Keywords:** *Sanctions, cigarettes without excise stamps, business actors.*